

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYESUAIKAN KAPASITAS FISKAL PASCA EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP TRANSFER KE DAERAH

Vrenanda Bella Yozevi<sup>1</sup>, Maulana Mukhlis<sup>2</sup>, Pitojo Budiono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [vrenandaby@gmail.com](mailto:vrenandaby@gmail.com)

### Abstrak

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional, namun kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, khususnya melalui penyesuaian transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah serta mengkaji peran dan strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kapasitas fiskalnya pasca penurunan atau penyesuaian transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah, dokumen anggaran, serta kebijakan terkait transfer ke daerah, yang diperkuat dengan wawancara terbatas kepada pihak terkait di pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyesuaian kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Pemerintah daerah merespons kondisi tersebut melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi dan prioritas belanja, serta penerapan kebijakan fiskal adaptif. Penelitian ini menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah dan penerapan tata kelola fiskal yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan anggaran pemerintah pusat.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Anggaran, Transfer ke Daerah, Kapasitas Fiskal, Pemerintah Daerah.

### Abstract

*The central government's budget efficiency policy is part of efforts to maintain national fiscal stability, but this policy has implications for the fiscal capacity of regional governments, particularly through adjustments to regional transfers. This study aims to analyze the impact of central government budget efficiency on regional fiscal capacity and examine the role and strategies of regional governments in adjusting their fiscal capacity following reductions or adjustments to regional transfers. This study uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data were obtained through a documentary study of regional financial reports, budget documents, and policies related to regional transfers, supplemented by limited interviews with relevant parties within the regional government. Data analysis was conducted thematically to identify patterns of adjustments to regional fiscal capacity. The results indicate that central government budget efficiency has resulted in a narrowing of regional fiscal space, particularly for regions with a high dependence on transfer funds. Regional governments respond to this situation by optimizing Regional Original Revenue (PAD), spending efficiency and prioritization, and implementing adaptive fiscal policies. This study confirms that the active role of regional governments and the implementation of good fiscal governance are key*

*factors in maintaining the sustainability of regional fiscal capacity amidst the dynamics of central government budget policies.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Budget Efficiency, Regional Transfers, Fiscal Capacity, Regional Government.*

## **A. PENDAHULUAN**

Peran pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal menjadi topik penting dalam studi kebijakan publik karena berhubungan langsung dengan kapasitas fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan (Zulkarnaini et al., 2024). Desentralisasi fiskal merupakan mekanisme pelimpahan wewenang dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pengelolaan keuangan publik sesuai kebutuhan lokal. Studi oleh Hastuti (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mekanisme transfer fiskal.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah pusat dapat mempengaruhi pola transfer dana ke daerah, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber utama pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pradana & Handayani, 2023). Efisiensi fiskal menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan penggunaan APBN dan meminimalisasi pemborosan, namun di sisi lain jalur transfer ke daerah sering kali mengalami tekanan akibat penyesuaian kebijakan anggaran tersebut.

Kapasitas fiskal daerah dipengaruhi oleh struktur pendapatan daerah, termasuk kemampuan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Tingkat kapasitas fiskal yang rendah mencerminkan keterbatasan daerah dalam melakukan ekspansi pembangunan tanpa bergantung pada bantuan dari pusat. Penelitian empiris lintas wilayah menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sementara dana transfer memiliki dampak yang kurang signifikan jika tidak disertai tata kelola anggaran yang baik (Panggabean, Mahendra & Setyaningsih, 2024).

Buku oleh Dalisawintri, Noor & Irawan (2025) mencatat bahwa penguatan sistem perpajakan daerah, pengurangan ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah merupakan strategi penting untuk memperkuat otonomi fiskal daerah. Hal ini mempertegas bahwa peran pemerintah daerah tidak hanya bersifat pasif menerima transfer, tetapi aktif dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara komprehensif peran pemerintah daerah dalam menyesuaikan kapasitas fiskal mereka pasca kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada Teori Desentralisasi Fiskal (Musgrave), Teori Fiskal Federalism (Oates), Teori Kapasitas Fiskal Daerah (Bahl), Teori Manajemen Keuangan Publik (Schick), serta perspektif Good Governance (World Bank) yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola fiskal daerah (Sawir, Aljurida & Susilawaty, 2025). Penelitian ini mengisi research gap dari studi sebelumnya yang lebih berfokus pada dampak transfer secara kuantitatif, dengan mengkaji secara spesifik strategi adaptif dan respons kebijakan pemerintah daerah pasca efisiensi anggaran pemerintah pusat.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Desentralisasi Fiskal dan Transfer ke Daerah**

Desentralisasi fiskal memberikan daerah ruang pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja, sehingga mendorong pembangunan yang lebih inklusif serta penyesuaian sumber daya fiskal terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Oates menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi (*information advantage*) dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang stabil dari pemerintah pusat (Khusaini, 2018). Transfer ke daerah, yang mencakup DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH), berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

## 2. Kapasitas Fiskal Daerah

Menurut Roy W. Bahl, kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan memperluas basis pendapatannya secara berkelanjutan (Dalisawintri, Noor & Irawan, 2025).

Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer pusat dapat mengurangi insentif inovasi fiskal di daerah dan memperlebar kesenjangan fiskal horizontal antar daerah. Studi oleh Syukri, Sofiaturohmah & Kasman (2025) menunjukkan bahwa pemotongan atau rasionalisasi transfer ke daerah berdampak berbeda sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

## 3. *Good Governance* dalam Tata Kelola Fiskal

Prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa strategi penyesuaian fiskal bersifat berkelanjutan. Menurut World Bank, tata kelola fiskal yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keterbatasan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik (Sawir, Aljurida & Susilawaty, 2025).

Allen Schick menekankan pentingnya penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik memberikan nilai tambah yang optimal (Nainggolan, 2024).

## C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam menyesuaikan kapasitas fiskal pasca kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, konteks, serta dinamika kebijakan fiskal daerah yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis, antara lain laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan pengelolaan fiskal. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh wawancara terbatas dengan pejabat pengelola keuangan daerah atau perencana anggaran guna memperoleh informasi kontekstual serta memperkuat hasil analisis dokumen.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang relevan, seperti perubahan struktur pendapatan daerah, strategi efisiensi dan prioritas belanja, serta kebijakan fiskal adaptif yang diterapkan pasca penyesuaian transfer ke daerah. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama melalui mekanisme penyesuaian transfer ke daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan utama APBD (Ekaputra et al., 2025). Ketika pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, alokasi transfer, baik DAU, DAK,

maupun DBH berpotensi mengalami penyesuaian (Sari, 2025). Hal ini berdampak pada kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja rutin maupun belanja pembangunan. Menurut Richard A. Musgrave, fungsi alokasi dan distribusi dalam sistem keuangan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya fiskal yang memadai di setiap tingkat pemerintahan (Putra et al., 2025).

Dari perspektif teori fiscal federalism, Wallace E. Oates menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi (*information advantage*) dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya, sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang stabil. Namun, kebijakan efisiensi anggaran sering kali bersifat makro dan berorientasi pada stabilitas fiskal nasional, sehingga kurang mempertimbangkan heterogenitas kapasitas fiskal antar daerah (Khusaini, 2018). Studi oleh Syukri, Sofiaturohmah & Kasman (2025) menunjukkan bahwa pemotongan atau rasionalisasi transfer ke daerah dapat memperlebar kesenjangan fiskal horizontal antar daerah, karena daerah maju relatif lebih mampu mengompensasi penurunan transfer melalui PAD, sementara daerah tertinggal semakin tertekan secara fiskal.

Dampak efisiensi anggaran juga tercermin pada perubahan struktur pendapatan daerah. Ketika transfer pusat mengalami penyesuaian, proporsi dana perimbangan dalam APBD cenderung menurun, sehingga pemerintah daerah dipaksa mengandalkan sumber pendapatan lain yang sering kali terbatas. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala struktural dalam optimalisasi PAD, seperti keterbatasan basis pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kapasitas administrasi perpajakan yang belum optimal (Dalisawintri, Noor & Irawan, 2025). Beberapa studi menunjukkan bahwa tekanan fiskal akibat penurunan transfer sering kali direspons dengan pemotongan belanja pembangunan atau belanja sosial, yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Simanjuntak et al., 2025).

Selain berdampak pada pendapatan, efisiensi anggaran pemerintah pusat juga mempengaruhi pola dan kualitas belanja daerah. Menurut Allen Schick, tekanan fiskal sering mendorong pemerintah untuk lebih berfokus pada keseimbangan anggaran jangka pendek dibandingkan pada efektivitas dan kualitas belanja publik. Dalam hal ini, efisiensi anggaran pusat dapat memicu perilaku fiskal defensif di daerah, di mana prioritas belanja lebih diarahkan pada pemenuhan belanja wajib seperti gaji pegawai dibandingkan belanja produktif (Amin, Wahyunadi & Baehaqi, 2024). Kondisi tersebut berpotensi menghambat inovasi kebijakan dan memperlemah peran strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal.

## **2. Peran Pemerintah Daerah dalam Menyesuaikan Kapasitas Fiskal**

Penurunan atau penyesuaian transfer ke daerah menuntut pemerintah daerah memainkan peran yang lebih aktif dan strategis dalam menjaga keberlanjutan kapasitas fiskalnya. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai penerima pasif dana transfer, melainkan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Studi empiris oleh Oki (2025) menunjukkan bahwa daerah yang mampu merespons penurunan transfer dengan strategi kebijakan yang adaptif cenderung lebih resilien secara fiskal.

Salah satu peran utama pemerintah daerah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Roy W. Bahl, peningkatan kapasitas fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan sendiri secara efisien dan adil. Optimalisasi PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan tarif pajak, melainkan juga dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, optimalisasi PAD menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam penyesuaian kapasitas fiskal melalui pengelolaan belanja yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil. Allen Schick menekankan

pentingnya penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik memberikan nilai tambah yang optimal (Nainggolan, 2024). Pemerintah daerah yang mampu mengalihkan fokus belanja dari belanja rutin yang kurang produktif ke belanja modal cenderung lebih mampu mempertahankan kapasitas fiskalnya dalam jangka menengah dan panjang.

Peran pemerintah daerah juga tercermin dalam kemampuan merumuskan kebijakan fiskal adaptif dan inovatif, seperti penyusunan APBD yang fleksibel, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta penguatan kerja sama antardaerah dan dengan sektor swasta. Dalam kerangka fiscal federalism, Wallace E. Oates menyatakan bahwa fleksibilitas kebijakan fiskal di tingkat lokal merupakan prasyarat utama bagi efektivitas desentralisasi. Daerah yang mengembangkan inovasi fiskal, seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), relatif lebih mampu mengatasi tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat (Keuangan, 2020).

Prinsip-prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa strategi penyesuaian fiskal tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berkelanjutan. Menurut World Bank, tata kelola fiskal yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keterbatasan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik (Sawir, Aljurida & Susilawaty, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyesuaian fiskal daerah sangat bergantung pada kepemimpinan, kapasitas institusional, dan komitmen pemerintah daerah dalam merespons dinamika kebijakan fiskal nasional.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat memiliki dampak signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama melalui penyesuaian transfer ke daerah yang menjadi sumber utama pendanaan APBD. Penurunan atau rasionalisasi transfer tersebut berimplikasi pada menyempitnya ruang fiskal daerah, khususnya bagi daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi dan kapasitas PAD yang rendah. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Dalam menghadapi tekanan fiskal tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyesuaikan kapasitas fiskalnya melalui berbagai langkah adaptif: optimalisasi PAD melalui perbaikan administrasi perpajakan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal; pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada prioritas pembangunan; serta penerapan kebijakan fiskal adaptif dan inovatif seperti pengembangan BUMD dan skema KPBU. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah merespons perubahan kebijakan fiskal nasional secara berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan kapasitas adaptif pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, H. M., Wahyunadi, S. E., & Baehaqi, H. (2024). *Membangun Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish.

- Dalisawintri, S. E., Noor, H. M., & Irawan, B. (2025). *Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)*. Nas Media Pustaka.
- Ekaputra, A. A., Febrianti, A., Muntaha, A. Y., Trianita, D., & Susanti, P. (2025). Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 11–20.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784–799.
- Keuangan, K. (2020). Kajian Fiskal Regional. *Transfer*, 97(8).
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nainggolan, E. P. (2024). Implementasi Sistem Anti-Fraud dalam Perencanaan dan Realisasi Dana Kelurahan. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 97–107.
- Oki, K. K. (2025). *Keuangan Daerah: Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Star Digital Publishing.
- Panggabean, J. S. E. A., Mahendra, A., & Setyaningsih, K. J. (2025). Peran Kapasitas Fiskal, Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *EQUILIBRIUM-Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(2), 279–290.
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 192–209.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 408–416.
- Sari, Y. P. (2025). Dapatkah Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 7(1), 13–25.
- Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1–16.
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 260–273.
- Syukri, U., Sofiaturohmah, S., & Kasman, A. (2025). Efisiensi fiskal dan dampaknya terhadap transfer dana daerah: Analisis kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 347–359.
- Zulkarnaini, Z., Islahuddin, I., Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic literature review: Menilik multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4353–4368.